

DAFTAR PUSTAKA

Dari buku

- Abdussalam, R, 2005, *Hukum Pidana Internasional*, Restu Agung, Jakarta.
- Ali, H.Zainuddin, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apeldoorn, Van,1990, *Pengantar Ilmu hukum (terj. Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht oleh Oetarid Sadino)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Atmadja, Arifin P.Soeria, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum:Teori, Praktik dan Kriitk*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Azhary, Muhammad Taher, 1992, *Negara Hukum,Suatu Study tentang Prinsip-prinsip nya diliat dari Segi Hukum Islam,Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Bako, Ronny Sautma Hotma, 2013, *Konsepsi hukum atas uang yang Dimiliki oleh badan hukum*, dalam Silalahi,Udin. 2013.*Keuangan Negara, Aset Negara, Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan*. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary* , Edisi VI, West Publishing ,St. Paul.
- Bloomfield, L.1996. *Language*,India:Motiial Bandarsidas
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M, 2011, *Sistem Hukum :Perspektif Ilmu Sosial.terj. The legal System ; A Social Science Perspective* (New York; Russel Sage Foundation,1975).diterjemahkan oleh M.Khozim, Nusa Media, Bandung.
- , *History of American Law*, Touchstone, California.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya R. *Et al*, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan:Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia.*, cetakan.i, Rajawali Press, Jakarta.
- Hairi, Prianter Jaya,2013, *Problematika Hukum Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, dalam Silalahi,Udin. 2013.*Keuangan Negara, Aset*

Negara, Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Hamzah, Andi, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, ed. revisi.4, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, dan RM. Surachman, 2014, *Pre-Trial Justice Discretionary*

Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; penyidikan dan penuntutan*, ed.2 cetakan 11, Sinar Grafika, Jakarta.

Harjono, Dhaniswara K, 2008, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, PPHBI, Jakarta.

Hart, H.L.A, 1961, *The Concept of Law*, The Clarendon Press, Oxford.

Horne, James C van dan John M Wachowicz, Jr, 2001, *Fundamentals of Financial Management*, Prentice Hall International, Inc, New Jersey.

Hutchinson, Terry, 2002, *Researching and Writing in Law 3rd Edition*, lawbook.

Kelsen, Hans, 1973, *General Theory of Law and State*, Russel Russel, New York.

Khairandy, Ridwan *et al*, 2007, *Good Corporate Governance: Perkembangan pemikiran dan implemenasinya di Indonesia dalam perspektif hukum*, Total Media, Jogjakarta.

Koh, Pearlie dan Victor Yeo, 1999, *Company Law*, Lexis Nexis, Singapura.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi; panduan untuk membasmi tindak pidana korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Kotler, Philip and Lee, Nancy, 2005, *Corporate Social Responsibility – Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, John Wiley and Sons, Inc, New Jersey.

Maine, Henry Sumner, 1913: *Village-communities in the East and West : six lectures delivered at Oxford with additional addresses*, J. Murray, London.

Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*,: UII Offset, Yogyakarta.

Mangesti, Yovita. A dan Bernard. L. Tanya, 2014, *Moralitas hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno,1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan; bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, cetakan.I,Ghalia, Bogor.
- Nindyo, Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT.Citra Bakti, Bandung.
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten korupsi :perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prodjoamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*,Mandar Maju, Bandung.
- Purwosutjipto,H.M.N, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jillid 2*, Djambatan, Jakarta.
- Radbruch, Gustav, 1961, *Einfuchrug in Die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: Koehler Verlag.
- Rajagukguk,Erman, 2006, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Depok.
- Saidi,Zaim, *et al*, 2003, *Dari Filantropi menuju CSR: Potret Kedermawanan Sosial Perusahaan di Indonesia*, Piramedia, Ford Foundation dan PIRAC, Jakarta.
- Silalahi, Udin,2013, *Keuangan Negara, Aset Negara, Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Simanjuntak,Cornelius dan Natalie Mulia,2009,*Organ Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji,2013, *Penelitian Hukum Normatif :suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Solihin, Ismail, 2009, *Corporate Social responsibility: From Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Bandung.
- Sudarto,2010, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung.
- Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2007, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Refika Aditama, Bandung.
- Suhendar, 2015.,*Konsep Kerugian Keuangan Negara; pendekatan hukum pidana, hukum administrasi negara dan pidana khusus korupsi*,Setara Press, Malang.
- Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria Sriwulyani, 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Suseno, Frans Magnis, 1993, *Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*.Kanisius, Yogyakarta.
- Sutopo,H.B, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University press, Surakarta.
- Tuanakotta, Theodorus M, 2014, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Utrecht, E, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- Witanto, D.Y, 2012, *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*, Mandar Maju, Bandung.

Dari Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 85, dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4654)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 NOMOR 134, dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 26, dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Dari jurnal, karya ilmiah, artikel, dan sumber lain

Ali, 2007, *Redefinisi Kerugian Negara dengan Sinkronisasi Undang-Undang*, 20 November 2007, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18031/redefinisi-kerugian-negara-dengan-sinkronisasi-undangundang> diakses tanggal 19 April 2016 pukul 11.40Wib

Cheam, Jessica, 2015, *The top 5 CSR stories in 2015*, 31 Desember 2015, [.http://www.eco-business.com/news/the-top-5-csr-stories-in-2015/](http://www.eco-business.com/news/the-top-5-csr-stories-in-2015/) diakses 25 Januari 2016 pukul 23.47WIB

Departemen keuangan, 2013, <http://www.ppkblu.depkeu.go.id/index.php/halaman/30/satker-blu> diakses 12 April 2016 pukul 19.58Wib.

Faiz, Pan Mohamad Faiz, 2007, *Sifat Dasar Dan Pengertian Mengenai Perbandingan Hukum*, <http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2007/02/perbandingan-hukum-1.html> diakses 4 April 2016 pukul 09.30Wib

Fitriyanto, Muhammad, 2010, Implikasi Piercing The Corporate Veil Bagi Pemerintah Selaku Pemegang Saham Mayoritas Persero Terhadap Kerugian Keuangan Negara, *Tesis*, FH-UGM, Yogyakarta.

Gunarto, Marcus Priyo Gunarto, 2012, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, Nomor 1, Februari 2012

Hukumonline,2014, *Tak Pakai APBN, Kasus UI Seharusnya Disidang di Peradilan Umum*,<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53edbed117e1b/ta-k-pakai-apbn-kasus-ui-seharusnya-disidang-di-peradilan-umum> diakses pada 3 April 2016 pukul 15.20Wib.

- linran, Indiyah, 2005, *Kata Serapan Dalam Bahasa Indonesia*. Proceeding, Seminar Nasional PESAT 2005 yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Gunadarma. Jakarta, 23-24 Agustus 2005.
- Indonesia Corruption Watch, 2007, *Menkeu: BHMN Wajib Setor ke Kas Negara* <http://www.antikorupsi.org/id/content/menkeu-bhmn-wajib-setor-ke-kas-negara> diakses 11 April 2016 Pukul 21.10Wib
- Irawan, Yanu, 2015, *Analisis Corporate Social Responsibility (CSR) PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Skripsi*, FIAN-UGM, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/korup> diakses 24 Januari 2016.
- Kementrian Hukum dan Ham, 2011, *RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jumat, 30 Desember 2011 14:48. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/1964-ruu-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.html> diakses 21 April 2016 pukul 22.48Wib
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, Jurnal hukum no. 1 vol. 16 Januari 2009.
- Kiroyan, Noke, 2008, "Institusionalisasi CSR Itu Sulit Dijalankan..." Jurnal Galang, Vol.3 No.3 Desember 2008, PIRAC, 2008, Opini
- Lal, Neeta, 2015, *Mandatory CSR in India: help or hindrance?* <http://www.eco-business.com/news/mandatory-csr-india-help-hindrance/> diakses 25 januari 2016 pukul 23.47WIB
- Malukunews, 2016, <http://malukunews.co/berita/seribu-pulau/tmsd8ec03n7nse> artikel 15 Januari 2016, diakses 11 April 2016 Pukul 11.18Wib
- Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalm Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi FH-UI .Jakarta.
- Naraduhita, Dea Cendani dan Tjiptohadi Sawarjuwono, 2012, *Corporate social responsibility: upaya memahami alasan dibalik pengungkapan csr bidang pendidikan*. Jurnal Akuntansi & Auditing 95 Volume 8/No. 2/Mei 2012.
- Novita, Liza, 2012, *Kajian Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bandung Dalam mewujudkan Putusan Yang memenuhi unsur kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kasus ganti Rugi Pengadaan tanah Waduk jatigede*, Tesis ,Program Pascasarjana Magister Kenotariatan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Parulian Ompusunggu, Arles, *Implikasi Kebijakan Perpajakan atas Tuntutan Stakeholder terhadap Kewajiban CSR Perusahaan*. Diunduh melalui https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis3pebts7KAhWPW44KHdnZDC0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fasp.trunojoyo.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F3_Implikasi-kebijakan-Perpajakan-atas-tuntutan-stakeholder-dlm-CSR-Perusahaan-ARLES.pdf&usg=AFQjCNGl1n8-Gg-h9p6urzZ1IK3kXQouQg&sig2=0bBHqL7LD9DYuSn3XPMYew&bv=m=bv.113034660,d.c2E tanggal 22 Desember 2015
- Pasaribu. H. Bomer, 2007, *Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dari Perspektif Program Legislasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Majalah Hukum Nasional (1), 2007.
- Purwanto, Kurnia, 2015, *Analisis Penerapan Strategi Corporate Social Responsibility, Tesis*, FM-UGM, Yogyakarta, Penelusuran melalui http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=85249&obyek_id=4 diakses pada 26 Januari 2016
- Porosmaluku, 2016, <http://porosmaluku.com/kadis-esdm-maluku-bakal-diaudit-investigasi/> tanggal 10 Maret 2016, diakses 17 April 2016 pukul 22.52.Wib
- Radar Palembang Jawa Pos, 2016, *Belum Akan Go Public*, Tanggal 15 Januari 2016. <http://www.radar-palembang.com/belum-akan-go-public/> diakses 27 April 2016 pukul 08.00Wib.
- Raharjo, Kharis, 2013, *Corporate Social Responsibility: Dari Etika Bisnis Menuju Implementasi Good Corporate Governance*. Jurnal Universitas Pandanaran. Vol 11, No 25 tahun 2013
- Satriyo Mukantardjo, Rudy., 2010, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dan Sejarah Perkembangannya. Materi disampaikan dalam acara pelatihan hakim dalam perkara korupsi*. Senin, 26 April 2010 bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) MA-RI
- Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016, <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> diakses 21 April 2016 Pukul 14.35Wib
- Sembiring, Eddy Rismanda, 2005, *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo.

- Setiadi, Wicipto, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Perseroan Terbatas*,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI8tiI1rNAhWk5qYKHY5SDTsQFgggtMAI&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php%3Farticle%3D106970%26val%3D4048&usg=AFQjCNFnSclubvYiZkn3zYTZM1_JsXLyw&bvm=bv.123664746,d.dGo
diunduh dan akses 20 Maret 2016 pukul 20.15WIB
- Sheikh, Saleem, 1998, *Introduction To The Corporate Governance: the hidden problem of corporate law and their solution*. Delaware Journal of Corporate Law. Volume 25.
- Soepomo, 2008, *Pemahaman Keuangan Negara*, 16 Juli 2008,
<http://opinihukumkasus-lc-bni.blogspot.co.id/2008/07/pemahaman-keuangan-negara.html> diakses 17 April 2016 Pukul 21.14Wib
- Suaramerdeka, 2014, *Unsoed tak punya pos penerimaan dana CSR*,
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/07/248627/Unsoed-Tak-Punya-Pos-Penerimaan-Dana-CSR> diakses 11 April 2016 Pukul 19.15Wib
- Suharto, Edi, 2016, <https://csrlingkunganindonesia.wordpress.com/makalah-csr-lingkungan/edi-suharto/> diakses 29 Januari 2016 jam 14.55WIB.
- Suharto,Edi, *Menggagas Standar Audit Program CS*,
- Susilo Adi, Priyanto, *Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. ISSN. 1907-0489 Volume 4, No.2.
- Tif, 2006, *Fatwa MA yang Menjadi Kontroversi*.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15556/fatwa-ma-yang-menjadi-kontroversi> diakses pada 05 Februari 2016.
- Varia Peradilan No. 122 Tahun 1999.
- Wiyainews, 2016, *Polres teluk bintuni tahap II kasus korupsi PNBPNBP*,
<http://wiyainews.com/polres-teluk-bintuni-tahap-ii-kasus-korupsi-pnbp.html> artikel 13 Desember 2016,diakses 14 April 2016 Pukul 13.35Wib.
- Yuntho,Emerson,et al,2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*,Makalah yang dikeluarkan oleh ICW Maret 2014

Putusan Pengadilan dan Sumber Hukum Lain

Fatwa Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 Atas permintaan Menteri Keuangan RI, melalui surat Menteri Keuangan RI Nomor S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006

Putusan Mahkamah Agung No. 154 PK/PID.SUS/2012 perihal peninjauan kembali an. Terdakwa Ir. Faisal Muaz dan Ir. Hadianto Eko Putro, tanggal 12 Oktober 2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 263 K/TUN/2014 perihal kasasi Perkara Indar Atmanto melawan Deputi Kepala Badan Pengawasan Dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi, tanggal 21 Juli 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tanggal 25 September 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 18 September 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/ PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tanggal 15 April 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XII/2013 tanggal 18 September 2014 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin
Nomor: 51/ Pid.Sus/ Tipikor/ 2013/ PN.Bjm an. Terdakwa IImi Umar
bin (alm) Umar, tanggal 30 April 2014

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang
Nomor 148/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg tanggal 3 April 2014 an.
Para Terdakwa Prof. EDY YUWONO, Ph.D. Bin SUYATMAN dkk

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2014/PT SMG tanggal 1 Juni 2014 an. Para
terdakwa Prof. EDY YUWONO, Ph.D. Bin SUYATMAN dkk.

Standards of professional responsibility and statement of the essential duties and
rights of prosecutors,1999.

United Nations Convention Against Corruption (terjemahan) dalam Feri Wibowo,
2006, *United Nations Convention Against Corruption* (dengan
terjemahan Indonesia) , Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bekasi.